GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar	**: REPUBLIKA**	**Tanggal**	**: 31 Agustus 2006**
Subyek	**: PEMBAKAR HUTAN**	**Hari**	**: KAMIS**
		Halaman	**: 22**

. Kementerian LH Segera Umumkan Pembakar Hutan

Presiden bertolak ke Singapura setelah api padam.

JAKARTA -- Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) telah mengantongi nama-nama perusahaan yang diduga terlibat dalam kegiatan pembakaran hutan. Nama-nama perusahaan yang jumlahnya lebih dari 20 tersebut akan segera diumumkan.

"Kami akan mengumumkan nama lebih dari 20 perusahaan yang diduga terlibat dalam kegiatan pembakaran hutan pada Jumat mendatang," kata Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH), Rachmat Witoelar, di Kantor Kementerian KLH, Rabu (30/8).

Witoelar mengungkapkan, KLH mengetahui nama-nama perusahaan itu dengan cara membandingkan peta-peta lokasi titik api dan peta perusahaan. "Saat kita tumpangkan peta titik api dengan peta perusahaan, terlihat titik api itu ada di wilayah perusahaan mana saja," jelasnya.

Cara tersebut, kata Witoelar, ditempuh karena selama ini KLH mengalami kesulitan untuk menentukan pelaku pembakaran hutan. "Ada hutan yang terbakar tetapi tidak ada saksi atau bukti sehingga dapat menentukan pelaku. Artinya tidak ada kasus," ujarnya.

Witoelar berharap metode baru yang dilakukan KLH tersebut dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pembakaran. "Saya kira, dari segi efektivitas, unsur membuat jera itu yang paling penting," katanya seraya mengungkapkan ke-20 perusahaan itu ada di Sumatra dan Kalimantan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Aburizal Bakrie, mengklaim ratusan titik api yang ada di Sumatra dan Kalimantan sebagian besar sudah berhasil dipadamkan. "Delapan puluh persen titik api sudah bisa teratasi," katanya di Kantor Presiden, kemarin.

Ical --sapaan Aburizal-- titik api berkurang setelah dilakukan pemadaman dengan hujan buatan. "Pak Kusmayanto (Menteri Riset dan Teknologi, Kusmayanto Kardiman, red) sedang memimpin pelaksanaan hujan buatan. Mudah-mudahan, dalam satu atau dua hari ini solusi sudah tercapai dan asap berkurang," kata Ical. Sebelumnya dia menargetkan semua api padam pada 2 September.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan melakukan kerja ke Singapura pada 4-5 September 2006, atau dua hari setelah seluruh titik api dipadamkan. Selama ini, Singapura merupakan negara yang terpaksa 'mengimpor' asap dari Indonesia.

Pembalakan

Di tempat terpisah, Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan, Departemen Kehutanan, Noor Hidayat, menyesalkan laju degradasi hutan yang masih mencapai 2,8 juta hektare per tahun. Menurut Noor, dari 120 juta hektare hutan yang dimiliki Indonesia, sekitar 59 juta hektare sudah hancur.

Menurut Noor, bila pembalakan hutan tak dihentikan, pada tahun 2020 hutan hijau Kalimantan hanya tinggal 10 persen dibanding luasnya saat ini. Hutan di Sumatra, kata dia, bahkan akan tinggal 10 persen pada tahun 2010.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Noor Hidayat menambahkan, jumlah masyarakat miskin di sekitar hutan sekitar enam juta orang. Mereka inilah, kata dia, yang dimanfaatkan para cukong. "Tapi kondisi mereka tetap saja miskin," ujarnya pada acara 'Konferensi Nasional Pemberantasan Kasus Illegal Logging melalui Pendekatan Kejahatan Kehutanan, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Korupsi' di Jakarta, kemarin.

Staf Khusus Menteri Kehutanan, Togu Manurung, menilai para cukong kayu yang memanfaatkan masyarakat tersebut sangat berbahaya. "Mereka adalah teroris lingkungan," ujar Togu

Direktur Eksekutif Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Indro Sugianto, mengatakan Instruksi Presiden No 4/2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal, sampai saat ini belum berwibawa. Sebab Inpres tersebut belum mampu menjerat dalang dan pemodal pembalakan liar. "Sejak Inpres diterbitkan hingga Agustus 2006, dari 27 kasus di tingkat pengadilan, 14 kasus diputus bebas dan 13 kasus dihukum paling lama dua tahun," ujarnya menyesalkan.

Indro meminta pemerintah menggunakan UU Korupsi, UU Pencucian Uang, UU Lingkungan Hidup, dan UU kehutanan untuk menjerat para dalang, pemodal, dan cukong *illegal logging*.

(ant/hri)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup